PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN BANK SAMPAH DI KOTA SEMARANG

Awwalul Rifky Noerchaisna, Aufarul Marom

Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Most of the waste that arises in Semarang City comes from households. This is consistently taking place, so it is important to manage from upstream. The waste management was then actualized through a waste bank program by the Semarang City Environmental Agency. The number of waste banks continued to increase significantly, but did not have a significant effect on the number of waste decreases. This happens because the role of DLH needs to be strengthened, in accordance with its duties listed in Semarang Mayor's Regulation No. 103 of 2021. This study aims to analyze the role along with the driving and inhibiting factors of the role of the Environmental Service towards the optimization of the waste bank in the city of Semarang. This study uses descriptive qualitative methods by collecting data through observation, interviews, and documentation activities. The results showed that the role of Semarang City DLH as a stabilizer showed good communication efforts but still needed an increase in direct review. As an innovator shows education to management who are not optimal due to the limitations of companions from DLH. As modernizers show the DLH strategy that has been running even though there is still much helped by initiatives from the community. As a pioneer shows a variety of initiatives that apparently cannot be optimized. As the executor himself needs to improve in carrying out its role in giving examples and helping the community. The driving factors found are related to the clarity of supporting regulations, political will, support from various parties, and the existence of community empowerment. The factor of the carrier is the allocation of companions and budgets that need to be added, processing organic waste that is still small, to the mindset, awareness, and habits of the community that do not care about waste management. Recommendations that can be given are to optimize various initiatives that have been carried out such as direct reviews that are rolled out, managing waste reporting, and the formation of kelurahan coordinators.

Keywords: *Environmental Service, Garbage Bank, Role*

ABSTRAK

Sebagian besar sampah yang timbul di Kota Semarang bersumber dari rumah tangga. Hal ini secara konsisten berlangsung, sehingga penting untuk melakukan pengelolaan dari hulu. Pengelolaan sampah tersebut kemudian diaktualisasikan melalui program bank sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Jumlah bank sampah terus mengalami penambahan yang signifikan, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penurunan sampah. Hal ini terjadi karena peran DLH yang perlu diperkuat, sesuai dengan tugasnya yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Semarang No. 103 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis peran beserta faktor pendorong dan penghambat peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap optimalisasi bank sampah di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DLH Kota Semarang selaku stabilisator menunjukkan upaya komunikasi yang baik namun masih perlu peningkatan pada peninjauan langsung. Selaku inovator menunjukkan edukasi kepada pengurus yang belum maksimal dikarenakan keterbatasan pendamping dari DLH. Selaku modernisator menunjukkan strategi DLH yang sudah berjalan meskipun masih banyak terbantu oleh inisiatif dari masyarakat. Sebagai pelopor menunjukkan beragam inisiatif yang ternyata belum bisa dioptimalkan. Sebagai pelaksana sendiri perlu peningkatan dalam melaksanakan perannya dalam memberikan contoh dan membantu masyarakat. Faktor pendorong yang ditemukan berkaitan dengan kejelasan regulasi yang mendukung, *political will*, dukungan dari berbagai pihak, dan adanya pemberdayaan masyarakat. Faktor penghambatnya yaitu alokasi pendamping dan anggaran yang perlu ditambah, pengolahan sampah organik yang masih sedikit, hingga pola pikir, kesadaran, dan kebiasaan masyarakat yang belum peduli dengan pengelolaan sampah. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah mengoptimalkan berbagai inisiatif yang sudah dilaksanakan seperti peninjauan langsung yang dirutinkan, pelaporan sampah terkelola, dan pembentukan koordinator kelurahan.

Kata Kunci: Bank Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, Peran

PENDAHULUAN

Masalah yang diakibatkan oleh sampah berkaitan dengan lingkungan hidup. Pengaruh sampah yang tidak dikelola dengan baik terdapat pada penurunan kualitas lahan, air, dan udara di wilayah sekitar. Hal itu akan berdampak secara sosial dan ekonomi, baik dalam waktu dekat maupun lama.

Timbulan sampah di Kota Semarang bersumber dari rumah tangga hingga 60,53%. Pemerintah tidak dapat menyelesaikan permasalahan sampah secara sepihak, perlu partisipasi individu untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sampah domestik atau rumah tangga. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya secara langsung terlibat dalam pengolahan sampah rumah tangga. Oleh karena itu dilaksanakanlah program bank sampah.

Dukungan dari pemerintah dan peran aktif masyarakat terhadap bank sampah berpengaruh terhadap operasional bank sampah (Pavitasari & Septiarani, 2023). Pada beberapa penelitian terdahulu, peran pemerintah sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan bank sampah, pemerintah dapat memberikan fasilitas yang berbentuk fisik maupun non-fisik. Juga dengan peran masyarakat sebagai pengurus bank sampah maupun sebagai nasabah sama pentingnya dalam mendukung operasionalisasi bank sampah.

Peran optimal dari keduanya akan membantu untuk menciptakan lingkungan yang sehat sekaligus berkontribusi positif terhadap perekonomian negara.

Di Kota Semarang, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang. Hal ini didasarkan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 yang mana memiliki Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan. Pada pelaksanaan tugasnya, bidang tersebutlah yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program bank sampah di Kota Semarang yang kemudian secara spesifik lagi diberikan kewenangannya kepada Subkoordinator Kearifan Lokal dan Pemberdayaan.

DLH Kota Semarang sudah melakukan berbagai cara melalui monitoring dan sosialisasi. Hal tersebut bertujuan untuk menjalankan penguatan melalui komunikasi, informasi, dan pembinaan. Hal ini tertuang dalam tupoksinya yang termuat dalam Peraturan Wali Kota Semarang No. 103 Tahun 2021 pasal 41 huruf f dan i yang menyatakan bahwa DLH bertugas menyiapkan kegiatan penyuluhan, pembinaan badan usaha dan masyarakat serta menyiapkan kegiatan peningkatan kapasitas pendamping kelompok masyarakat peduli lingkungan

hidup. Namun realitanya upaya penyuluhan yang dilakukan masih belum bisa menjangkau seluruh bank sampah yang eksis.

Terdapat setidaknya 647 unit bank sampah yang tersebar di Kota Semarang hingga tahun 2025. Melalui pertimbangan banyaknya jumlah bank sampah tersebut, ditunjuklah salah satu bank sampah di setiap kecamatan sebagai koordinator. Koordinator kecamatan berperan untuk mendampingi bank sampah unit yang ada. Meskipun DLH berharap bisa mendampingi langsung setiap bank sampah yang ada, karena hal tersebut merupakan salah satu tugasnya yang termuat dalam Perwalkot Semarang No. 103 Tahun 2021 Pasal 41 huruf e yaitu, “menyiapkan kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok masyarakat pendukung kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.” Namun realitanya masih ditemukan banyak bank sampah yang vakum atau mati suri, atau tidak tertib melaporkan tonase sampah terkelolanya.

Laporan timbulan sampah di bank sampah masih belum secara teratur dilaksanakan oleh pengurus bank sampah. Menurut penuturan dari pegawai DLH, sudah termasuk sangat bagus ketika laporan bisa mencapai 60% dari

keseluruhan bank sampah yang ada. Berikut adalah tabel perbandingan jumlah bank sampah yang eksis dengan bank sampah yang melaporkan tonase sampah terkelolanya.

Tabel 1. Perbandingan Total Bank Sampah dengan Jumlah Bank Sampah yang Melaksanakan Laporan

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah bank sampah eksis	47*	225	497	647
Bank sampah yang melaporkan	104	129	87	138

Sumber: RKPD Kota Semarang dan SIPSN, 2025

Secara penjualan sampah, DLH mengatakan belum adanya kemitraan yang tetap. Padahal ini merupakan salah satu tugasnya yang tercantum dalam Perwalkot Semarang No. 103 Tahun 2021 Pasal 41 huruf g. Bank sampah hanya bisa menjual sampah yang dibutuhkan oleh pengepul. Untuk sampah lain yang belum bisa dijual, pada akhirnya akan menumpuk di gudang dan dibuang lagi ke tpa. Kalaupun ada penjualan sampah yang jarang diminati, biasanya hanya bersifat sementara karena permintaan yang sedikit.

Penelitian mengenai peran pemerintah dalam pelaksanaan program bank sampah sangat jarang ditemukan. Berdasarkan dengan latar belakang yang

telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam optimalisasi pengelolaan bank sampah unit yang eksis di Kota Semarang beserta dengan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaannya. Analisis dilakukan menggunakan teori Peran Pemerintah oleh Siagian (2009) yang mengklasifikasikan lima peran pemerintah, yaitu Selaku Stabilisator, Inovator, Modernisator, Pelopor, dan Pelaksana Sendiri. Untuk menemukan faktor pendorong dan penghambat peran tersebut, digunakan teori dari Nugrahaningsih (2023) yang menyebutkan tiga faktor yaitu perubahan struktural, fungsional, dan kultural.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Situs penelitian pada penelitian ini adalah Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan Bank Sampah Unit di Kota Semarang. Subjek dalam penelitian ini merupakan pelaku yang secara langsung terlibat dalam upaya optimalisasi pelaksanaan program bank sampah, diantaranya adalah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Subkoordinator Bidang Kearifan Lokal dan Pemberdayaan, Koordinator Kecamatan Bank sampah Unit di Kota Semarang dan Ketua Bank Sampah Unit di

Kota Semarang. Para informan tersebut ditentukan menggunakan *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap Optimalisasi Bank Sampah di Kota Semarang

Optimalisasi bank sampah di Kota Semarang merupakan tugas bersama dari pemerintah dan masyarakat. Dalam mengelola program tersebut diperlukan sinergi yang baik antara keduanya agar bank sampah berjalan efektif. Pemerintah sebagai pihak yang berinisiatif membentuk bank sampah di masyarakat memiliki peran yang cukup penting. Hasil dari penelitian menunjukkan,

a. Peran Selaku Stabilisator

Peran sebagai stabilisator dilakukan untuk menjaga aktivitas bank sampah agar tetap konsisten berjalan. Oleh karena itu, peran ini bertujuan menjaga stabilitas sosial budaya yang ada di masyarakat sebagai eksekutor bank sampah unit. Dalam hal ini, DLH Kota Semarang melakukan berbagai cara diantaranya dengan membentuk model komunikasi agar memudahkan

koordinasi, melakukan sosialisasi, hingga melakukan peninjauan langsung.

Berdasarkan penelitian Putri & Priyanti (2024) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam sebuah program akan mengalami peningkatan ketika dilakukan dengan strategi komunikasi yang efektif. Berbagi informasi secara vertikal maupun horizontal akan baik ketika komunikasi berjalan mudah. Dalam hal ini, DLH membentuk *What'sApp Group* bersama dengan seluruh ketua bank sampah resmi yang terdaftar di Kota Semarang. Bahkan DLH juga terbuka kepada bank sampah untuk menghubungi secara pribadi tanpa ada ketentuan waktunya.

Peninjauan langsung akan membentuk komunikasi secara tatap muka. Sejauh ini belum ada peninjauan langsung yang dilakukan oleh DLH kepada bank sampah unit. Bank sampah unit biasanya menerima kunjungan yang intens pada momen-momen tertentu seperti lomba. Juga saat DLH diundang untuk menghadiri kegiatan atau mengadakan kegiatan di wilayah tertentu. Bisa juga ketika DLH mengadakan sosialisasi yang berbentuk forum dengan fokus untuk membahas perihal bank sampah. Namun jangkauannya masih terbatas pada wilayah dan pihak tertentu.

b. Peran Selaku Inovator

Pemerintah merupakan salah satu sumber keterbaruan. DLH memiliki inisiatif untuk membentuk bank sampah di masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Agar program tersebut bisa berjalan, DLH perlu mengenalkan bank sampah kepada masyarakat. Setelah dikenalkan dan terbentuk bank sampah unit, pada prosesnya perlu diikuti dengan edukasi dan pembinaan yang keberlanjutan.

Pengelolaan sampah dari rumah, biasa disebut sebagai pilah sampah, sudah menjadi program *Focuss Group Discussion (FGD)* DLH di masyarakat. Setiap tahunnya, di seluruh kecamatan di Kota Semarang, dipilih satu kelurahan yang berlaku sebagai *pilot project* dan akan berganti setiap tahunnya. FGD pilah sampah ini diakui oleh DLH sebagai instrumen untuk mengenalkan bank sampah.

Pembinaan menjadi alat untuk menyebarkan semangat kepada pengurus bank sampah dan masyarakat agar program bank sampah berjalan efektif. Bukan hanya dari DLH, pembinaan yang berjalan di masyarakat menjadi tanggung jawab setiap pemangku wilayah dari kelurahan dan kecamatan, bahkan hingga RT dan RW, sesuai dengan Instruksi Wali Kota

Semarang No. 1 Tahun 2024. Oleh karena itu, pembinaan ini perlu koordinasi yang baik, apalagi dibantu oleh Tim Penggerak PKK Kota Semarang beserta inisiatif dari aktivis atau kader lingkungan yang ada.

Pengurus bank sampah yang juga merupakan bagian dari masyarakat masih membutuhkan edukasi dari DLH. Namun karena keterbatasan pendamping dari DLH yang hanya 4 orang untuk 16 kecamatan, menjadikannya belum bisa menyeluruh. Edukasi masih terbatas pada para korcam atau lebih jauh lagi bisa kepada para ketua bank sampah. Dari situ, DLH akan dibantu oleh korcam dalam meneruskan informasi.

c. Peran Selaku Modernisator

Transformasi dilakukan dengan didasari oleh sebuah permasalahan, inovasi, atau mengikuti tren global. Dalam hal ini sangat penting bagi pemerintah untuk membantu masyarakat agar meningkatkan kemampuan mereka, hingga memiliki *power* untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam skala yang lebih luas, negara bisa menyelesaikan masalahnya, menciptakan inovasi yang berguna, dan dapat bersaing di dunia global.

Untuk mengenalkan pada masyarakat, DLH melaksanakan *FGD*

Pilah Sampah. Kemudian strategi pendampingan oleh DLH adalah dengan melakukan pendataan bank sampah aktif dan nonaktif. Setelah itu, untuk bank sampah yang nonaktif akan diaktifkan untuk aktif kembali. DLH juga akan membentuk bank sampah-bank sampah baru. Oleh karena itu, DLH akan mengusahakan untuk masuk ke lingkup terkecil hingga ke RT.

Untuk melakukan transformasi keterampilan masyarakat dalam mengelola bank sampah salah satunya yaitu dengan mengadakan pelatihan. Melalui beberapa metode yang mencakup pelatihan, pendampingan, dan pengembangan sistem kerja, akan meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan efektivitas bank sampah (Hidayat & Fredy, 2023). Pelatihan ini masih sangat terbatas cakupannya karena masih banyak bank sampah yang belum mendapatkan pelatihan yang dimaksud, terutama untuk pelatihan administrasi.

Selain pengurus bank sampah, penting bagi DLH untuk melakukan penyadaran langsung kepada masyarakat. DLH menjadikan *FGD* tentang pengelolaan sampah dari rumah sebagai alat untuk menyadarkan masyarakat. Terbatasnya peserta kegiatan yang diselenggarakan DLH

menjadikan penyadaran ke masyarakat dilakukan oleh kader dan pegiat lingkungan yang hadir. Namun masih terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran mengelola sampah.

d. Peran Selaku Pelopor

Pemerintah memiliki peran sebagai pembuka jalan di berbagai sektor pembangunan demi efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Peran ini diamalkan dengan menjadi garda terdepan untuk setiap pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam hal pengelolaan sampah. Sehingga masyarakat sebagai pelaksana langsung program bank sampah sudah memiliki referensi yang dapat diikuti.

Berbagai inisiatif sudah dijalankan oleh DLH agar pengurus bank sampah terus aktif mengelola sampah di masyarakat. Inisiatif tersebut adalah pembuatan *WAG* untuk seluruh bank sampah resmi terdaftar di Kota Semarang. Kemudian juga dibentuknya Bank Sampah Induk di kecamatan.

Beberapa inisiatif belum dijalankan dengan baik dan juga terdapat inisiatif yang baru dari DLH. Inisiatif yang belum dijalankan dengan baik adalah peninjauan langsung. Juga dengan laporan tonase sampah terkelola. Hal ini dibuktikan dengan penurunan data tonase sampah terkelola dari tahun 2021

hingga 2023. Inisiatif baru yang akan dijalankan adalah diadakannya koordinator kelurahan yang berfungsi sama seperti korcam, namun dengan lingkup yang lebih kecil.

Penambahan jumlah bank sampah di Kota Semarang akan terus bertambah, dengan target 1 unit bank sampah per-RW. DLH tidak berperan langsung pada saat pembentukannya. DLH hanya akan mendatangi bank sampah yang sudah resmi. Bukan tanpa alasan, hal itu terjadi karena DLH tidak mengetahui lokasi bank sampah yang berdiri tanpa diberi tahu oleh korcam.

Untuk masyarakat umum, DLH menggunakan pendekatan melalui sosial media. Melalui instagram dan twitter DLH Kota Semarang, dibuat konten yang mengajak masyarakat untuk memilah sampah, termasuk dengan memanfaatkan bank sampah terdekat. Hal ini dilakukan karena sosial media memiliki cakupan yang lebih luas, baik wilayah maupun usia.

e. Peran Selaku Pelaksana Sendiri

Pemerintah tentu saja turut berperan untuk menyukseskan program ini. Oleh karena itu, para pegawai di kantor DLH Kota Semarang harus menerapkan di lingkungan kantornya. Kemudian juga dengan peran untuk melakukan fasilitasi kemitraan dengan pihak ketiga yang

dalam Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kota Semarang.

Dalam melaksanakan pemilahan sampah di lingkungan kantor DLH Kota Semarang, masih belum secara keseluruhan memiliki kesadaran untuk melakukan. Hal itu dikarenakan perbedaan tupoksi yang tidak semuanya berurusan dengan pengelolaan sampah. Namun sudah diupayakan untuk memberikan sosialisasi kepada pegawai DLH dengan menyelipkannya pada saat apel atau rapat. Juga dengan menitipkannya ke pejabat struktural.

Salah satu tahapan dalam aktivitas bank sampah adalah penjualan sampah. Sesuai dengan Jakstrada atau Perwal No. 79 Tahun 2018, salah satu tugas dari DLH adalah melakukan fasilitasi antara swasta dengan bank sampah. Sebelum tahun 2020, DLH sudah pernah membantu untuk menjual sampah-sampah jenis plastik yang memang sulit untuk dijual. Namun pasca pandemi, bantuan tersebut belum berjalan lagi.

2. Faktor-Faktor yang Mendorong Peran DLH dalam Optimalisasi Bank Sampah di Kota Semarang

a. Perubahan Struktural

Pada faktor ini, DLH Kota Semarang memiliki dasar untuk menjalankan aktivitasnya. Penelitian dari Wahyuni et

al. (2023) menyatakan bahwa kejelasan peran atau tupoksi berkontribusi positif terhadap kinerja pegawai. Dasar yang dipakai adalah Peraturan Wali Kota Semarang No. 103 Tahun 2021 yang merupakan tugas dari subkoordinator bidang kearifan lokal dan pemberdayaan.

Hal lain yang mendukung pelaksanaan program bank sampah ini adalah *political will* yang baik. DLH menganggap program bank sampah ini sama pentingnya dengan semua program yang mereka jalankan. Dukungan lain juga hadir dari Wali Kota Semarang yang baru sehingga bank sampah ini cukup menjadi sorotan utama. Hal ini dibuktikan dengan Program Pendampingan Bank Sampah di setiap kecamatan sebagai program 100 hari kerja walikota.

Faktor ini akan berpengaruh pada peran pemerintah seperti peran stabilisator yang dibuktikan dengan program pendampingan bank sampah. Juga berpengaruh pada peran pelopor yang mana pemerintah harus membuktikan dengan selalu mengambil inisiatif yang relevan dan tepat guna.

b. Perubahan Fungsional

Secara kualitatif, di masyarakat, bank sampah ini sudah berpengaruh dalam mengurangi sampah sekaligus

meningkatkan kesadaran masyarakat. Memang belum signifikan, tetapi pengaruhnya terus memperlihatkan pertumbuhan. Kemudian secara kuantitatif, pengurangan sampah di Kota Semarang belum mencapai target yang ditentukan dalam Jakstrada.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitri et al. (2024) regulasi bank sampah di tingkat lokal akan mendukung operasional bank sampah, mendorong partisipasi masyarakat, dan memberikan manfaat sosial. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan PermenLHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bank Sampah pada Bank Sampah. Selain itu, dasar hukum lain yang digunakan DLH adalah Jakstrada dan Instruksi Wali Kota Semarang No. 1 Tahun 2024..

Kegiatan dari komunitas seperti pelatihan dan sosialisasi berpengaruh positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, meskipun memiliki tantangan seperti kurangnya keterlibatan dari pemerintah (Ulva et al., 2024). DLH bersama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah, juga dengan pemangku wilayah pada lingkup kecamatan dan kelurahan, bahkan hingga ke RW dan RT. Eksekusi yang dijalankan dengan baik akan menciptakan peningkatan kesadaran

masyarakat yang kemudian akan berpengaruh kepada aktivitas bank sampah, maupun sebaliknya.

Faktor ini akan berpengaruh pada peran pemerintah sebagai pelaksana sendiri. Pemerintah memiliki peran untuk melakukan fasilitasi kemitraan dengan pihak lain untuk membantu bank sampah, terutama dalam proses penjualan. Adanya kerja sama akan mendukung peran inovator yang mengharuskan pemerintah melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat.

c. Perubahan Kultural

Program bank sampah pada masyarakat Kota Semarang diterima dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan yang signifikan BSU aktif yang mana di tahun 2025 sudah berdiri 664 unit bank sampah. Jumlah ini akan terus bertambah seiring target yang diberikan oleh pemerintah kota untuk mendirikan satu unit bank sampah di tiap RW.

Menurut penelitian Aryani & Salsabila Sadikin (2022) pemberdayaan melalui bank sampah dapat menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui manfaat ekonomi dan pengembangan produk berbasis sampah. Masyarakat mendapatkan banyak manfaat dari adanya program

bank sampah yang dijalankan. Secara sosial, masyarakat menggunakan hasil penjualan bank sampah untuk kegiatan bersama. Prestasi yang didapatkan yaitu pelatihan dan sertifikat internasional, memenangkan lomba proklamasi, dan di tingkat individu terdapat aktivis yang menyabet penghargaan kalpataru. Secara ekonomi juga menciptakan produk kreativitas yang bernilai ekonomis, menambah uang belanja, bahkan terdapat sistem penggajian meskipun jumlahnya tidak banyak.

Faktor ini akan mempengaruhi peran pemerintah sebagai modernisator dan inovator. Kedua peran tersebut akan menegaskan legitimasi pemerintah yang akan memudahkan proses transfer dari pemerintah dan transformasi yang terjadi di masyarakat.

3. Faktor-Faktor yang Menghambat Peran DLH dalam Optimalisasi Bank Sampah di Kota Semarang

a. Perubahan Struktural

Petugas dan anggaran merupakan dua resources penting yang perlu dialokasikan secara efisien dan memadai. Kinerja pembangunan ekonomi dan kualitas hidup manusia dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh efisiensi sektor publik (Prakoso, 2016). Keterbatasan pendamping yang disediakan oleh DLH

tentunya membuat masyarakat merasa kehadiran dari DLH masih kurang. Kemudian sumber daya keuangan atau anggaran. Program bank sampah dijalankan oleh masyarakat dengan dukungan anggaran dari pemerintah dalam bentuk pengadaan seperti sarpras dan pendampingan. Tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk pengurus bank sampah maupun operasionalnya.

Keterbatasan pendamping yang disediakan oleh DLH sulit untuk menjangkau seluruh BSU, terutama dalam peninjauan langsung. Bahkan sampai sekarang belum ada penjadwalan yang rutin untuk melakukan pendampingan atau setidaknya memberikan motivasi dan semangat. Secara pencapaiannya, kinerja bank sampah dalam mengurangi sampah belum memenuhi target.

Efisiensi akan mempengaruhi peran sebagai stabilisator. Jika pendamping dan anggaran dari pemerintah tidak sebanding dengan jumlah dan kebutuhan bank sampah, maka peninjauan langsung dan sosialisasi tidak bisa mencakup keseluruhan.

b. Perubahan Fungsional

Mayoritas bank sampah masih kesulitan dalam melakukan pengelolaan sampah organik. Sampah organik yang mayoritas berasal dari sisa makanan

merupakan komposisi sampah terbesar di Kota Semarang. Penyebabnya cukup beragam dari kurangnya ketersediaan lahan, serta kurangnya keterampilan dan kesadaran masyarakat.

Pemangku wilayah di kecamatan dan kelurahan wajib untuk mendampingi dan membentuk bank sampah di wilayahnya sesuai dengan Inwal No. 1 Tahun 2024. Bagi wilayah yang kurang memperhatikan bank sampah di wilayahnya, maka berpengaruh pada pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayah tersebut.

Peran pemerintah sebagai modernisator akan berjalan kurang efektif tanpa adanya perhatian lebih dari pemangku wilayah setempat seperti kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW. Kurangnya kapasitas bank sampah dalam hal keterampilan dan prasarana untuk pengolahan sampah organik juga mengurangi keberhasilan pemerintah dalam perannya selaku modernisator.

c. Perubahan Kultural

Pola pikir dan kesadaran masyarakat sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program bank sampah di Kota Semarang. Perlu banyak dilakukan upaya yang reguler dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat. DLH dan pengurus bank sampah atau pegiat sosial sering melakukan

sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah. Agar pengelolaan ini bisa dilaksanakan secara konsisten, perlu motor yang terus menggerakkannya. Mayoritas pengurus bank sampah di Kota Semarang masih bersifat sosial, tanpa upah atau gaji.

Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan program bank sampah adalah kesadaran dari masyarakat (Sasoko, 2024). Sekalipun sudah banyak masyarakat yang mulai menabung di bank sampah, realitanya masih banyak pula masyarakat yang memiliki kebiasaan buruk dalam menangani sampah. Seperti membakar sampah, membuang sampah sembarangan seperti di sungai, jalanan, atau saluran air lainnya, atau masih membuang sampah tanpa memilah maupun mengolahnya.

Faktor ini akan berpengaruh pada peran pemerintah sebagai inovator dan pelopor. Kedua peran tersebut akan berhasil ketika masyarakat membentuk bank sampah dan menjalankannya. Pun dengan peran pemerintah sebagai pelaksana sendiri. Ketika masyarakat masih memiliki pola pikir dan perilaku yang kurang peduli terhadap pengelolaan sampah, tiga peran pemerintah tersebut tidak akan berjalan.

KESIMPULAN

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam optimalisasi bank sampah dilihat melalui lima peran, yaitu sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri. Sebagai stabilisator, DLH mengadakan *WhatsApp Group* untuk memudahkan dalam bertukar informasi dan berkoordinasi. Juga dengan melaksanakan program baru di setiap kecamatan dengan topik pendampingan bank sampah. Namun di sisi lain, belum ada peninjauan langsung yang dilakukan secara reguler.

Sebagai inovator, transfer ilmu dari DLH kepada masyarakat sangatlah penting. Untuk mengenalkan bank sampah kepada masyarakat, DLH melakukannya melalui *FGD* Pilah Sampah yang rutin dilakukan berbasis *pilot project*. DLH juga membina dengan berkoordinasi bersama pemangku wilayah setempat dan juga dibantu oleh PKK. Setelah terbentuk bank sampah di masyarakat, DLH juga melakukan edukasi kepada pengurusnya. Namun edukasi yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dikarenakan keterbatasan pendamping dari DLH.

Sebagai modernisator, DLH mengawali strategi dengan melakukan pengenalan kepada masyarakat dan pendampingan kepada pengurus bank

sampah. Juga melakukan pendataan bank sampah dan mengambil tindakan yang diperlukan, bahkan diproyeksikan akan membentuk bank sampah hingga di lingkup terkecil. Namun keterbatasan DLH membuat masyarakat beraktivitas secara mandiri seperti memberikan pelatihan kepada pengurus bank sampah hingga proses penyadaran kepada masyarakat.

Sebagai pelopor, beberapa inisiatif yang sudah dilakukan oleh DLH yaitu pembuatan *WhatsApp Group*, dan dibentuknya Bank Sampah Induk di tiap kecamatan. Inisiatif lain yang belum berjalan dengan baik atau akan dijalankan diantaranya adalah peninjauan langsung, laporan tonase sampah terkelola, dan pembentukan koordinator kelurahan. Untuk menyebarluaskan program ini, DLH membuat konten yang diposting di sosial media. Namun DLH masih belum berperan langsung dalam pembentukan bank sampah unit di masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tentunya turut berpartisipasi dalam pelaksanaan bank sampah ini. Pegawai DLH juga perlu menerapkan aktivitas pilah sampah di kantornya. Namun kenyataannya masih banyak yang belum memiliki kesadaran akan hal itu. Kemudian DLH juga memiliki tugas untuk membantu bank sampah dalam melakukan penjualan pada jenis-jenis sampah tertentu.

Dulu, DLH pernah membantu untuk menjualkan sampah, namun sekarang sudah berhenti.

Faktor pendorong pelaksanaan bank sampah adalah terdapat kejelasan regulasi terkait penentuan DLH sebagai pihak yang mengurus bank sampah melalui Perwalkot No. 103 Tahun 2021. Adanya *political will* dari pemerintah, baik dari DLH maupun dari Wali Kota Semarang. Bank sampah membantu mengurangi sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah. Keberjalanan program ini didukung regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah. Dukungan juga datang dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, beserta para pemangku wilayah di masyarakat. Di masyarakat, penerimaan terhadap program ini cukup besar, terbukti dengan penambahan jumlah BSU yang terdaftar di DLH. Bahkan masyarakat juga merasakan manfaat langsung dalam segi ekonomi maupun sosial, hingga prestasi yang bersifat prestise.

Faktor penghambat datang dari internal maupun eksternal DLH. Alokasi pendampingan dan anggaran tidak seimbang dengan jumlah bank sampah yang eksis. Oleh karena itu, sulit bagi DLH untuk bisa hadir melakukan sosialisasi dan pendampingan ke seluruh bank sampah yang ada di Kota Semarang. Kemudian

minimnya kapabilitas bank sampah dalam mengelola sampah-sampah organik yang merupakan penyumbang sampah terbesar. Ditambah lagi dengan minimnya dukungan fisik maupun psikis dari pemangku wilayah setempat. Juga dengan perbedaan pola pikir, kesadaran, dan kebiasaan masyarakat yang belum mempedulikan pengelolaan sampah. Hal tersebut dikarenakan beragamnya karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis.

SARAN

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang perlu membuat peninjauan langsung yang reguler kepada seluruh bank sampah yang ada di Kota Semarang. Hal ini bisa dilakukan pada lingkup kelurahan ataupun kecamatan dengan tujuan agar masyarakat merasakan kehadiran dan dukungan dari DLH.
2. Pemerintah perlu memasifkan pengolahan sampah organik di masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan serta menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti membantu menyediakan gedung atau lahan khusus untuk pengolahan sampah organik di masyarakat.
3. Mengoptimalkan inisiatif yang sudah atau belum dilakukan seperti pelaporan sampah terkelola dan membentuk

koordinator kelurahan. Kemudian komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat atau antarmasyarakat. Juga perlu kepedulian dan ketegasan dari pemangku wilayah di kecamatan dan kelurahan terhadap bank sampah untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan.

4. Segera membentuk kerja sama berkelanjutan dengan komitmen penuh bersama pihak lain atau *off-taker* yang bisa menerima jenis sampah yang sulit dijual.
5. Penambahan alokasi pendamping dan anggaran untuk program bank sampah. Penambahan ini ditujukan untuk mendukung berbagai saran yang sudah ditulis sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel:

- Abdussamad, J., Tui, F. P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONE BOLANGO. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(4), 850–868. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.504>
- Aisha, N. W. (2023). Pengaruh Bank Sampah Terhadap Jumlah Sampah Plastik di Indonesia. *Jurnal Alternatif - Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 14(1), 68–73. <https://doi.org/10.31479/jualter.v14i1.57>
- Aryani, S., & Salsabila Sadikin, Z. (2022). Pemberdayaan Masyarakat dengan Bank Sampah: Membangun Kesadaran dan Meningkatkan Kesejahteraan. *Jurnal JUPEMA*, 1(2), 10–14. <https://doi.org/10.22437/jupema.v1i2.36884>
- Auliya, A. N., & Arif, L. (2021). Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk ...*, 8(1), 22–31. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1416>
- David, V. E., John, Y., & Hussain, S. (2020). Rethinking sustainability: a review of Liberia's municipal solid waste management systems, status, and challenges. In *Journal of Material Cycles and Waste Management* (Vol. 22, Issue 5, pp. 1299–1317). Springer Japan. <https://doi.org/10.1007/s10163-020-01046-x>
- Eka, E. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Rumbai Pesisir. *Jurnal Niara*, 9(2), 109–114. <https://doi.org/10.31849/ni.v9i2.2104>
- Fitri, N. R., Himawan, A. S., Fadillah, A. S., & Dahayu, H. P. (2024). Mengulas Regulasi Terkait Mekanisme Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kota Padang. 2(1), 38–42.
- Hani, M., & Safitri, D. P. (2019). Kemudi: *Jurnal Ilmu Pemerintahan | 123 Pengembangan Kapasitas Bank Sampah Untuk Mereduksi Sampah Di Kota Tanjungpinang*. 04, 123–143.

- <https://doi.org/10.31629/kemudi>.
- Hidayat, R., & Fredy, M. (2023). Optimalisasi Kinerja Pengurus Bank Sampah Desa Bening melalui Pelatihan dan Pengembangan Sistem Kerja yang Terstruktur. *Prosiding Patriot Mengabdi*, 167–177. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/spm/article/view/2836>
- Hutami, G., & Chariri, A. (2011). Pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran terhadap komitmen independensi auditor internal pemerintah daerah. *Universitas Diponegoro*, 1, 1–27.
- Ikeanyibe, O. M., Eze Ori, O., & Okoye, A. E. (2017). Governance paradigm in public administration and the dilemma of national question in Nigeria. In *Cogent Social Sciences* (Vol. 3, Issue 1, pp. 1–16). Cogent. <https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1316916>
- Mandpe, A., Paliya, S., Gedam, V. V., Patel, S., Tyagi, L., & Kumar, S. (2023). Circular economy approach for sustainable solid waste management: A developing economy perspective. In *Waste Management and Research* (Vol. 41, Issue 3, pp. 499–511). <https://doi.org/10.1177/0734242X221126718>
- Muljaningsih, S., Khusniyah Indrawati, N., & Amalina Nur Asrofi, D. (2023). Waste Bank Policy as Social Engineering Based on the Green Economy Concept in the Malang City, Indonesia. *Civil and Environmental Engineering*, 19(1), 271–279. <https://doi.org/10.2478/cee-2023-0024>
- Pavitasari, G. A., & Septiarani, B. (2023). Rencana Pengelolaan Sampah Melalui Optimalisasi Bank Sampah Pada Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik. *Jurnal Riptek*, 17(2), 105–120. <https://doi.org/10.35475/ripteck.v17i2.212>
- Putri, Z. A., & Priyanti, E. (2024). Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Program Pembangunan di Kelurahan Karawang Kulon Government Communication Strategy in Increasing Community Participation in Development Programs in Karawang Kulon Subdistrict. 5(2), 243–254.
- Saputra, T., Astuti, W., Nasution, S. R., & Zuhdi, S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Community Participation in. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 246–251.
- Sasoko, D. M. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Keberlanjutan Program Bank Sampah: Studi Di Kawasan Padat Penduduk. *Studi Interdisipliner Perspektif*, 23(2), 108–116.
- Septiani, B. A., Arianie, D. M., Risman, V. F. A. A., Handayani, W., & Kawuryan, I. S. S. (2019). PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI SALATIGA: Praktik, dan tantangan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(1), 90. <https://doi.org/10.14710/jil.17.1.90-99>
- Setiyaningrum, I. F., Wati, A., & Suryati, S. (2022). The existence of waste bank management and the impact on the environment and trends of community consumption (Case study of the Ngudi Resik Waste Bank, Krecekan, Wironanggan, Sukoharjo). *Journal on Biology and Instruction*, 2(1), 9–19. <https://doi.org/10.26555/joubins.v2i1.6074>

- Susilowati, S., & Herdiansyah, H. (2019). Application of waste bank use in reducing household waste in suburban area? *Journal of Physics: Conference Series*, 1381(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1381/1/012050>
- Suwerda, B., Hardoyo, S. R., & Kurniawan, A. (2019). PENGELOLAAN BANK SAMPAH BERKELANJUTAN DI WILAYAH PERDESAAN KABUPATEN BANTUL. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 11(1), 74–86. <https://doi.org/10.20885/jstl.vol11.iss1.art6>
- Ulva, N., Devi, K., Fadila, S. N., Mustofa, A., Khumairoh, I. W., Prasetyo, M. A., Pratama, E. S., Akbar, M. H., Andrian, M., Efendi, P., Studi, P., Publik, A., & Panca, U. (2024). *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah melalui Program Bank Sampah di Kota Probolinggo*. 4(4), 2509–2514.
- Wahyuni, E., Kholid, I., & Ahiruddin, A. (2023). Pengaruh Tugas Pokok Dan Fungsi Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang. *Prosiding Seminar Nasional ...*, 73–77. <https://jurnal.saburai.id/index.php/FEB/article/view/2212%0Ahttps://jurnal.saburai.id/index.php/FEB/article/download/2212/1621>
- Wulandari, S. (2013). PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN MUSRENBANG DI KOTA TARAKAN. *EJournal Administrasi Negara*, 1(4), 1540–1553.
- Buku:**
- Hi. Ibrahim, Abd Halil, Tjahja Supriatna. 2019. *Epistemologi Pemerintahan Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gramasurya
- Keban, Yermias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Nugrahaningsih, Widi et al. 2023. *Pengantar Manajemen Pemerintahan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Siagian, Sondang P. 2009. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dokumen / Peraturan Perundang undangan:**
- RKPD Kota Semarang Tahun 2025
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021